

## COMMUNITY EMPOWERMENT ANALYSIS TOWARDS A PROSPEROUS BARENGKRAJAN VILLAGE COMMUNITY

Hepy Oktavianto Pradana<sup>1</sup>, Sutinem<sup>2\*</sup>, Ratna Handayani<sup>3</sup>, Muhamad Imam Syairozi<sup>4</sup>

\*e-mail Penulis Korespondensi : [sutinem@unisla.ac.id](mailto:sutinem@unisla.ac.id)

Faculty Economic and Business, Universitas Islam Lamongan

### ABSTRACT

*The study aims to analyze the community empowerment program and analyze the implementation of the community empowerment program in Barengkrajan Village. The researcher applied the triangulation method to get answers to the research questions. The findings show that the empowerment program carried out in Barengkrajan Village is very effective. The village implements the One Village One Product (OVOP) program so that the program carried out can be maximized and more effective by adding value (product differentiation) from the program that has been carried out.*

**Keywords:** *community empowerment, prosperous society, OVOP*

## ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU MASYARAKAT DESA BARENGKRAJAN SEJAHTERA

### ABSTRAK

Studi bertujuan untuk menganalisis program pemberdayaan masyarakat dan menganalisis implementasi program pemberdayaan masyarakat di Desa Barengkrajan. Peneliti menerapkan metode triangulasi untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian. Temuan menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan di Desa Barengkrajan sangat efektif. Desa menerapkan program *One Village One Product (OVOP)* sehingga program yang dilakukan bisa maksimal dan lebih efektif dengan menambahkan nilai (diferensiasi produk) dari program yang sudah dilakukan.

**kata Kunci:** pemberdayaan masyarakat, masyarakat sejahtera, *OVOP*

**Korespondensi:** Sutinem. Universitas Islam Lamongan. Email: [sutinem@unisla.ac.id](mailto:sutinem@unisla.ac.id)

### INTRODUCTION

APBDes sebagai matra anggaran untuk membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mendorong dalam program kegiatan penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi penting dalam pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Di Indonesia, upaya pemberdayaan sering kali difokuskan pada sektor pertanian dan perikanan karena kedua sektor ini menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat pedesaan.

Desa Barengkrajan, yang terletak di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo,

merupakan salah satu desa yang mengandalkan budidaya ikan lele sebagai mata pencaharian utama. Kelompok pembudidaya ikan lele di desa ini telah berperan penting dalam meningkatkan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat (Putri & Wijayanti, 2019). Namun, meskipun budidaya ikan lele memiliki potensi ekonomi yang besar, tantangan dalam pengelolaannya masih banyak dihadapi oleh para pembudidaya. Di antaranya adalah kurangnya pengetahuan teknis, keterbatasan akses terhadap modal, dan kesulitan dalam pemasaran produk. Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan kelompok pembudidaya ikan lele

**Submitted:** Februari 2025, **Accepted:** Maret 2025, **Published:** April 2025

ISSN: 2614 - 3968 (printed), ISSN: 2615 - 6237 (online), Website: <https://e-journal.umaha.ac.id/index.php/ecopreneur/index>

menjadi sangat penting. Program ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan, keterampilan, dan akses yang lebih baik kepada para pembudidaya, sehingga mereka dapat mengelola usaha budidaya ikan lele dengan lebih efektif dan efisien (Suryadi, 2020).

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat (Adi et al., 2024). Dalam konteks ini, efektivitas pemberdayaan menjadi fokus utama. Efektivitas dapat diukur dari beberapa aspek, termasuk peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas produk, serta peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Hidayat & Maulidiyah, 2018). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat cenderung lebih efektif karena melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap program tersebut, tetapi juga memastikan bahwa intervensi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat (Anwar & Sari, 2017).

Di Desa Barengkrajan, pendekatan partisipatif telah diterapkan dalam beberapa program pemberdayaan, namun evaluasi secara menyeluruh terhadap efektivitasnya dalam konteks budidaya ikan lele belum dilakukan. Menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam kelompok pembudidaya ikan lele di Desa Barengkrajan. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana program-program yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan kapasitas pembudidaya dan dampaknya terhadap kesejahteraan mereka. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan program pemberdayaan di masa mendatang (Santoso, 2021). Dengan melakukan

evaluasi ini, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam literatur tentang pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan perikanan di Indonesia, tetapi juga memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk merancang program pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan (Nugroho, 2020). Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan mengingat pemberdayaan yang dilakukan oleh Desa apakah telah efektif untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk menjadikan orang menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab. Memberdayakan orang dapat dilakukan dengan cara memindahkannya dari posisi yang biasanya hanya melakukan apa yang disuruh, menjadi posisi lain yang memberikan kesempatan untuk lebih bertanggung jawab (Wafa, 2019). Pemberdayaan dapat diawali dengan hanya sekedar memberikan dorongan kepada orang agar mau memainkan peran lebih aktif dalam pekerjaannya, sampai pada melibatkan mereka dalam mengambil keputusan atau tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut (Suryono, 2016).

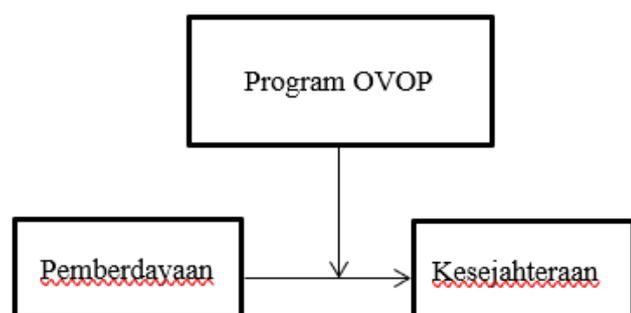
### **Kesejahteraan**

Konsep kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari kualitas hidup masyarakat. Dimana kualitas hidup masyarakat dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik maupun ekonomi masyarakat tersebut. Salah satu isu yang perlu diperhatikan adalah konsep kesejahteraan. Pengukuran konsep kesejahteraan setidaknya memiliki dua bentuk pengukuran, yaitu objektif dan subjektif

(Resmiya & Misbach, 2019). Definisi kesejahteraan dalam dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga negara (Wibowo et al., 2023).

## METODE PENELITIAN

### Model Penelitian



Gambar 1. Model skema pemikiran penelitian  
Sumber: Penulis (2024)

### Metode

#### Desain Penelitian

*Research design* ini yaitu *qualitatif research* dengan rumusan masalah mencakup hubungan *basic* pengamatan dan wawancara. Riset tersebut bermaksud menganalisa oemberdayaan yang ada di Desa dan implementasinya untuk menuju kesejahteraan melalui program OVOP yang dimiliki Desa Barengkrajan.

#### Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada riset ini yaitu data primer yang didapatkan dari wawancara dan observasi dan data sekunder dari Desa Barengkrajan mengenai program kerja Desa.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada riset ini yaitu menggunakan teknik observasi dan wawancara.

## RESULTS AND DISCUSSION

Kegiatan ekonomi desa Barengkrajan selama ini masih didominasi oleh sektor swasta dengan penduduk desa Barengkrajan sebagai karyawan swasta sebanyak 3.437 orang, sedangkan potensi usaha mikro yang ada di Desa Barengkrajan sebanyak 574 usaha (data terlampir). Mengingat wilayah desa Barengkrajan hanya 0,51 Ha yang berupa lahan persawahan sisanya didominasi tanah kering untuk permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Sehingga potensi umumnya adalah sector nonpertanian yakni dibidang pengolahan bahan pangan, perdagangan dan jasa. Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sektor non pertanian, akan tetapi masih banyak tanaman yang nilai ekonomisnya tinggi dengan memanfaatkan potensi tanaman dilahan sempit diantara lahan yang ada misalnya; Tanaman Obat obatan (jahe, lengkuas, mengkudu, Dewa-Dewi, Kumis kucing dan lainnya); Tanaman perkebunan (Mangga, Pisang, Kelengkeng, Belimbing, Jambu, Nangka dan lainnya); tanaman sayur mayor (Kacang-kacangan, Kangkung, Kelor, Cabe, Terong, dan lainnya), Sedangkan potensi perikanan darat sangat kurang sehingga perlu dukungan pemerintah desa untuk pemberdayaannya, misalnya budidaya ikan lele dan gurami, dimana potensinya menjanjikan adalah perdagangan.

Kata “*empowerment*” dan “*empower*” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pemberdayaan dan memberdayakan, menurut Merriam Webster dan oxford english dictionery (dalam priyono dan pranarka, 1996 : 3) 16mengandung dua pengertian yaitu : pengertian pertama adalah : „*to give power or authority to*’, dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*.

Dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Konsep *empowerment* pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain. Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan, bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, proses untuk memperoleh daya atau kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengorganisasian masyarakat desa Barendkrajan dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan. Disini masyarakat dapat membentuk panitia kerja, melakukan pembagian tugas, saling mengawasi, merencanakan kegiatan, dan lain-lain.

Lembaga-lembaga adat yang sudah ada sebaiknya perlu dilibatkan karena lembaga inilah yang sudah mapan, tinggal meningkatkan kemampuan-nya saja. Sesuai dengan konsep pemberdayaan, pemerintah Desa Barendkrajan berupaya memberikan kemampuan kepada masyarakatnya dengan memberikan program yang dapat masyarakat desa Barendkrajan kembangkan. Pemerintah Desa Barendkrajan menggunakan metode *one village one product* untuk memaksimalkan program pemberdayaan. Menurut perangkat Desa Barendkrajan, pada saat ini telah dipilih lele sebagai komoditas yang dikembangkan. Dari satu komoditas dapat dilakukan beberapa hal antara lain : budidaya lele dan pembuatan kripik lele. Komoditas tersebut diperuntukkan bagi para ibu-ibu PKK dan warga masyarakat Barendkrajan usia produktif tetapi

belum bekerja. Para warga tersebut dibantu dan diharapkan dapat berdaya dalam segi perekonomiannya.

### Pembahasan

Kepala Desa sebagai pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maka Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentruk dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten dengan tata kelola yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa. Oleh karena itu Kepala Desa Barendkrajan sebagai pejabat Pemerintah Desa Barendkrajan diwajibkan melakukan sebuah laporan dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM Desa) Juncto pasal 5 dan pasal 12 peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang penyusunan Laporan Kepala Desa. Setiap tahunnya dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa dengan dilanjutkan dengan pembuatan rinciannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dimana semua bidang kegiatan di Desa diharuskan mempunyai sebuah perencanaan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada.

Pemahaman perihal diatas dimaksudkan agar pembangunan menjadi terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan baik fisik maupun non fisik dapat terbangun secara kontinyu dan terpadu sehingga masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus, atas kesadaran sendiri, melakukan pembenahan pembangunan di Desa serta sebagai bahan koordinasi, sinkronisasi, sinergi dan integrasi progam tahunan yang masuk ke Desa agar pembangunan Desa dapat berjalan baik dan benar.

Desa Barengkrajan Kecamatan Krian yang kondisi letak Desanya sebagian besar kontur tanahnya adalah datar bekas persawahan yang sudah menjadi area permukiman. Irigasi persawahan sudah tidak digunakan untuk mengairi persawahan penduduk tetapi lebih berfungsi sebagai saluran pembuangan air. Tidak banyak sumber daya alam yang potensial. Persawahan di Desa Barengkrajan hanya ada 50,50 Ha dari luas Desa Barengkrajan yang mencapai 224,84 Ha. Pendapatan asli Desa Tahun 2013 S/D 2023 secara rutin kurang lancar karena terjadi keterlambatan pembayaran. PAD dari hasil lelang sewa tanah kas Desa dipergunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan Desa selama 1 (Satu) tahun anggaran ditambah dengan Dana Desa (DDS) Dari pemerintah pusat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan bagi Hasil Pajak (PBH) termasuk retribusi dari pemerintah daerah.

Dari pendapatan lainnya sampai saat ini belum ada dan masih sebatas hanya swadaya semampunya dari penduduk Desa Barengkrajan. Untungnya semangat gotong royong warga Desa Barengkrajan Tetap tumbuh dan berkembang dengan baik daam setiap kegiatan pembangunan dan sesuai dengan anggaran yang telah tertuang dalam APB Desa Barengkrajan. Mengingat dimana adanya kewajiban pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran di setiap tahunnya maka diperlukan pengawasan, kritik dan saran yang harmonis atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa oleh Badan Pemusyawaratan dan masyarakat desa.

Dana Desa yang didapatkan dari pemerintah pusat diharapkan dapat membantu pelaksanaan program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Barengkrajan. Implementasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan membeli bibit lele dan kolamnya, sehingga warga msyarakat (ibu-ibu PKK dan warga masyarakat usia produktif) dapat

melakukan pembibitan dan mengembangkan. Pemerintah desa Barengkrajan memang menggunakan metode *one village one product* untuk memaksimalkan program pemberdayaan. Tetapi dari satu produk tersebut diharapkan dapat dikembangkan. Tidak hanya memanen lele, tetapi juga mengolah lele menjadi sesuatu yang lebih banyak. Seperti untuk lele dengan ukuran yang terlalu kecil dan besar diolah menjadi keripik lele. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya di desa yang sama tentang olahan ikan lele (Adi et al., 2024).

## CONCLUSION

1. Program pemberdayaan masyarakat di Desa Barengkrajan dilakukan dengan memberikan program One Village One Product yang dapat dikembangkan oleh masyarakat Desa Barengkajan.
2. Implementasi program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan membeli bibit lele dan kolamnya, sehingga warga msyarakat (ibu-ibu PKK dan warga masyarakat usia produktif) dapat melakukan pembibitan dan mengembangkan.

## REFERENCES

- Adi, J., Tengtarto, G., Anam, K., Syukri, A., Rosidin, M. K., & Ekasari, R. (2024). *Cost Benefit Analysis Of Implementing Vacuum Frying Technology In Processing Resistant Catfish ( Case Study Of Barengkrajan Village , Sidoarjo ) Cost Benefit Analysis Penerapan Teknologi Vacuum Frying Dalam Pengolahan Lele Afkir ( Studi Kasus Desa Barengkrajan Sidoarjo )*. Jurnal Ecopreneur. 7(2), 162–171.
- Anwar, M., & Sari, R. (2017). Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan di desa: Sebuah tinjauan konsep dan praktik. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat , 2(1), 15-25.
- BPKP. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta

- BPS. 2015. Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Timur
- Hidayat, S., & Maulidiyah, E. (2018). Efektivitas program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan: Studi kasus di Desa Wonokromo. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 5(2), 102-115.
- Kemendesa. 2016. Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016. Jakarta.
- Kemenkeu. 2015. Kebijakan Umum Dana Desa. Jakarta.
- Kemenkeu. 2016. Dana Desa 2016. Jakarta.
- Nugroho, T. (2020). Evaluasi program pemberdayaan masyarakat di bidang perikanan: Studi kasus di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 12(3), 88-96.
- Nurus Sa'adah. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal. Yogyakarta.
- Resmiya, L., & Misbach, I. H. (2019). Pengembangan Alat Ukur Kualitas Hidup Indonesia. *Jurnal Psikologi Insight*, 3(1), 20-31.  
<https://doi.org/10.17509/insight.v3i1.22247>
- Suryono, B. (2016). Pendelegasian Wewenang Versus Pemberdayaan Karyawan Dalam Perspektif Manajemen. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(4), 214.  
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y1999.v3.i4.1895>
- Wafa, M. A. (2019). Pengaruh Kerja Tim Terhadap Kepuasan Kerja Melalui Komitmen. *Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*, 7(1). <https://doi.org/10.31227/osf.io/rfsyx>
- Wibowo, S. A., Tama, M. I., Ametlok, M. P. P., Reandi, A. R. D., & As Syukri, K. A. (2023). Pendampingan Pembuatan Pupuk Organik Cair dan Pestisida Dari Bawang Putih dan Limbah Kulit Bawang di Desa Pugeran, Kabupaten Mojokerto. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 161-170.  
<https://doi.org/10.33086/snpm.v3i1.1244>